

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ballington, Jullie dan Azza Karam. 2005. *Introduction. In Women In Parliament: Beyond Numbers*. Stockholm: International IDEA.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, Ellydar, dkk.. 2021. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Grafiti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Donald, Parulian. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Efriza, Yoyoh Rohaniah. 2015. *Pengantar Ilmu Politik (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*. Malang: Intrans Publishing.
- Elly Setiadi dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group.
- Hady, Nuruddin. 2021. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press.
- Hiplunudin, Agus. 2019. *Perempuan, Politik, dan Pemilu*. Tuban: Spasi Media.
- I., A. Rahman H. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo. 2020. *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Putaska Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Isnaeni. 2004. *Peran Wanita dalam Politik*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Kelsen, Hans. 2010. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

- King, Desmon dan Gerry Stoker. 1996. *Rethinking Local Democracy*. London: Macmillan Press.
- Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim. 2018. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PD. Budi Chaniago.
- Labolo, Muhadam dan Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Litbang Kompas. 2016. *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonstruksi Kuasa*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Lubis, Marzuki. 2011. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Murniati. 2004. *Getar Gender, Perempuan dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Tera.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2007. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Arus Pemikiran Konsitusionalisme, Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Kata Hasta.
- Nimmo, Dan. 2000. *Political Communication and Public Opinion*. California: Goodyear Publishing Company.
- Phillips, Anne. 1998. *The Politics of Presence*, Oxford: Oxford University Press.
- Pitkin, Hanna. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Raharjo, Satjipto. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- S.A., Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastrodmojo, S. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sawer, Marian. 1985. *Program for Change Affirmative Action in Australia*. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.
- Setiadi, Elly dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitabuana, Tundjung Herning. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Siti Homzah, M. Sulaeman, dan Binahayati. 2004, *Laporan Penelitian Peluang dan Tantangan Keberdayaan Perempuan dalam Politik*, Bandung: Pusat Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Sri. 1984. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Subandi, Imam. 2020. *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*. Depok: Pustaka Milenia.
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia,
- Suryawati, Nany. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Susetyo, Wasis. 2015. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2015.
- Tambunan, A. S. S. 1986. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta.
- Tierney, Helen. 1999. *Women's Studies Encyclopedia*. United State: Greenwood Press,
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wasi, Imron. 2020. *Politik, Partai Politik, dan Perempuan Frontstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Wijaksana, MB. 2004. *Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wolhoff, G.J. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Timun Mas.
- Yayasan Jurnal Perempuan. 2006. *Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Rekomendasi Umum Komite No. 25 Tahun 2004 tentang Tindakan Khusus Sementara

Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 Tahun 1997 tentang Perempuan Dalam Kehidupan Politik

C. Jurnal

Arka, I Ketut. 2021. Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Volume 2 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.759>.

Aulya, Aziza, Andi Pangerang M., Hamzah Halim. 2022. Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian, Amanna Gappa. Volume 30 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>.

Fahmi, Khairul. 2016, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4 No. 2, hlm. 183-184.

Hasan, Muhardi dan Estika Sari. 2005. Hak Sipil dan Politik. *Demokrasi*. Volume IV, No. 1.

Inwantoro, Totok, Yuwanto Yuwanto, dan Nunik Retno Herawati. 2014. Faktor Penghambat Serta Pendorong Perempuan Untuk Maju Sebagai Calon Legislatif Pada Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, Volume 3 No. 3.

Kertati, Indra. 2019. Quo Vadis: Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan di Legislatif, *Mimbar Administrasi*. Volume 15 No. 29. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/mia.v16i19.1259>.

Mukaro, Zaenal. 2008. Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator*. Volume 9, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>.

Panjaitan, Edward M.L. 2018. Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *To-ra*. Volume 4 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>.

- Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2018. Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan. *Jurnal Wacana Politik*. Volume 3.1. DOI: <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15783>.
- Puri, Widhiana Hestining. 2013. Kontekstualitas Affirmative Action Dalam Kebijakan Pertahanan di Yogyakarta. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanian* (37). 169–180. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.157>.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2016. Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan. *Jurnal Wacana Politik*. Volume 1.2. DOI: <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.
- Rahmawati. 2004. Potret Kuota Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 7 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.11062>.
- Sanger, Beverly Gabrielle. 2019. Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional. *Lex Et Societatis*. Volume VII No. 3. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24689>.
- Santoso, M. Agus. 2011. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum*. Volume 4 No. 15. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7>.
- Sayuti, Hendri. 2013. Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara*. Volume 12 No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/menara.v12i1.409>.
- Thalib, Nur Asikin. 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*. Volume II No. 2. DOI: <https://10.15408/jch.v1i2.1466>.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2017. Perlindungan Hukum Persamaan Hak Perempuan Hak Asasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *To-ra*, Volume 3 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.33541/tora.v3i3.1162>

D. Internet

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. “Jumlah Anggota DPRD Kab/Kota 2018-2019. *Available from: https://jabar.bps.go.id/indicator/156/416/1/jumlah-anggota-dprd-kab-kota.html*. Diakses pada 18 Desember 2022 Pukul 10:20 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2021. “Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2014.” *Available from: https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2021/08/21/3647/jumlah-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2014.html* . Diakses pada 15 Desember 2022 Pukul 17:11 WIB.

- Badan Pusat Statistik, 2020, Statistik Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2018-2019, (Diakses pada 01 Oktober 2022, pukul 16:04 WIB), Available from: <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/2/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>.
- Bekasipedia.com. "Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bekasi 2019, Dapil 1, 2, 3, 4, 5, dan 6." Available from: <https://issuu.com/redaksibekasipedia>. Diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 20:34 WIB.
- Development Goals. Gender Equality. available from: <https://developmentgoals.org/?s=gender+equality>, diakses pada 07 Desember 2022 Pukul 20:18.
- Inter-Parliamentary Union Parline. "Monthly Ranking of Women in National Parliament per 1 November 2022". Diakses pada <https://data.ipu.org/women-ranking?month=11&year=2022> pada 13 Desember 2022 pukul 12:49 WIB.
- Kusnandar, Viva Budy. 2022. "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar Dunia (2021)". Databoks. Available from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/ini-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-urutan-berapa>. Diakses pada 13 Desember 2022 pukul 17:51 WIB.
- Mantalean, Vitoria, "Keterwakilan Perempuan Hanya 8 dari 50, Pimpinan Kota Bekasi Enggan Salahkan Partai", Kompas, 26 Agustus 2019, (Diakses pada 01 Oktober 2022, pukul 16:25 WIB). Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/26/18041541/keterwakilan-perempuan-hanya-8-dari-50-pimpinan-dprd-kota-bekasi-enggan>.
- Pangarso, Nugel Dwiputra. 2022. "Hambatan Perempuan Dalam Politik", Serial Online Beranda Inspirasi. Diakses pada 9 November 2022. Available from: <https://berandainspirasi.id/hambatan-perempuan-dalam-politik/>.
- Puskapol UI, 2020, Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 Jawa Barat, (diakses pada 20 April 2022 Pukul 19:46 WIB), diakses dari: <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-jabar>.
- Si Pokrol, 2009, "Affirmative Action", Hukum Online.com, (diakses pada 19 April 2022 Pukul 21.05 WIB) available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018. "Affirmative Action". Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/> diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022 Pukul 14:41.